

## **Analisis Kemandirian Pembangunan Daerah Kabupaten dan Kota Ciayumajakuning**

### **Analysis of Independence of District and City Development Ciayumajakuning**

**Hani Sri Mulyani<sup>1\*</sup>, Dadang Sudirno<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

<sup>2</sup>Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

\*E-mail: [hanisrimulyani@unma.ac.i](mailto:hanisrimulyani@unma.ac.i)

Naskah masuk: 2020-09-10

Naskah diperbaiki: 2020-12-11

Naskah diterima: 2020-14-11

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kemandirian Pembangunan Daerah Kab/Kota Ciayumajakuning Periode 2011-2018. Kemandirian pembangunan daerah diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian Pembangunan Daerah yang diperoleh dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan website Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh sehingga diperoleh total sampel dari penelitian ini yaitu 5 Kabupaten/Kota terdiri dari Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan selama periode 2011-2018 sehingga diperoleh total data sampel 40 data sampel. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis rasio kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat fenomena Fly Paper Effect pada Kab/Kota Ciayumajakuning, artinya daerah tersebut belum mampu membiayai pembangunannya sendiri dan masih tergantung pada pemerintah pusat.

**Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Pembangunan Daerah, Fly Paper Effect.**

#### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the Independence of Development District/City Of Ciayumajakuning Period 2011-2018. Regional development independence is measured using the Regional Development Independence Ratio obtained from the website of the Directorate General of Financial Balance (DJPK) and the website of the Central Bureau of Statistics (BPS) of the District/City in West Java. The method of analysis used is a descriptive method of analysis. The sample determination technique in this study uses saturated sample method so that the total sample obtained from this study is 5 districts/cities consisting of Cirebon, Cirebon Regency, Majalengka Regency, Indramayu Regency and Kabupaten Kuningan during the period 2011-2018 so that a total sample data of 40 sample data is obtained. The analysis tool used in this study is to use self-reliance ratio analysis. The results showed that there is still the phenomenon of Fly Paper Effect in District/City Of Ciayumajakuning, meaning the scattered area has not been able to finance its own development and still depends on the central government.*

**Keywords: Regional Native Income, Regional Development Independence, Fly Paper Effect.**

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah diartikan sebagai “pembangunan di daerah” dengan inisiatif, arahan, perencanaan dan dana pemerintah pusat (Kuncoro, 2014 : 37). Apabila suatu daerah menginginkan pembangunan daerah yang baik maka, pelaksanaan tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus didasarkan perencanaan yang baik, prinsip kerja yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka (transparency) dan akuntabilitas (accountability). Kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah maupun masyarakat baik itu dari segi pembangunan, ekonomi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu disebut dengan otonomi daerah (Marizka : 2013).

Masalah yang paling penting dalam kerangka otonomi daerah yaitu menyangkut pembagian atau perimbangan pusat dan daerah. Perimbangan pusat maupun daerah sangat penting, terutama yang perlu diperhatikan yaitu mengenai keadilan politik dan keadilan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan desentralisasi fiskal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut (Ariani : 2016) Berlakunya Undang-Undang tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan potensi lokal dan meningkatkan kinerja dalam mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Menurut Halim (2018), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan.

Kemandirian Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Negara yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), faktor yang mempengaruhi Kemandirian daerah yaitu Belanja Daerah, Penerimaan Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi.

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah daerah yang manfaatnya untuk membiayai kepentingan dan kegiatan daerah dan dipungut berdasarkan Undang-Undang serta bersifat memaksa dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Pajak daerah menjadi alat ukur atau penentu besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tinggi rendahnya Pajak Daerah mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah.

Retribusi merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Mardiasmo, 2017:18). Fluktuasi penerimaan retribusi daerah akan berpengaruh terhadap besaran Pendapatan

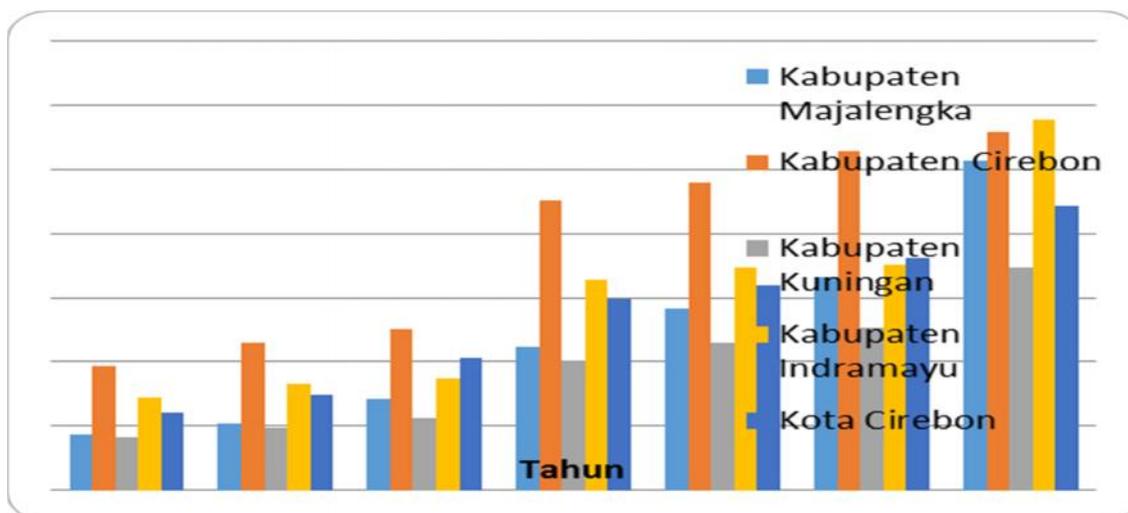
Asli Daerah (PAD), apabila dana Retribusi yang masuk ke kas daerah mampu memberikan kontribusi terhadap daerah untuk pembangunan daerah sehingga daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendominasi pembiayaan daerah dibandingkan dana pemerintah pusat, sehingga daerah mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri artinya tinggi rendahnya Retribusi dapat memengaruhi Kemandirian Pembangunan Daerah.

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, kemandirian suatu daerah dapat dipengaruhi oleh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mampu mengoptimalkan kapasitas fiskalnya. Indikator pertumbuhan Ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan menurut lapangan usaha daerah Kabupaten/Kota. Apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), suatu daerah telah mencapai Tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang baik, apabila masyarakat daerah memiliki potensi dan keahlian berwirausaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mampu memenuhi kebutuhan, melaksanakan pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah. Seperti destinasi

wisata, bandara, hotel, restoran dan sebagainya. Tidak hanya di daerah perkotaan, bahkan di wilayah Kabupaten/Kota Ciayumajakuning juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Seperti saat ini Majalengka yang sedang berkembang dan mengalami pembangunan di sekitarnya, baik itu destinasi wisata, hotel, restoran, maupun bandara Internasional yang saat ini tekeh resmi dibuka, menurut Fajar Sidik (2014) kehadiran mega proyek Bandara Internasional Jabar (BIJB) di Kertajati, Majalengka, diyakini menjadi magnet yang akan menarik investasi baru dalam jumlah besar. Melihat hal tersebut tentunya akan menjadikan Majalengka sebagai pusat pertumbuhan baru di Jawa Barat bagian timur.

Menurut Ilmi Yanfaunnas (2017) Kota Cirebon dengan infrastruktur kota yang sudah dapat dikatakan baik dan sumber Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan selama 4 tahun berturut-turut terutama yang bersumber dari Pajak Daerah, Selain itu Kabupaten Indramayu juga saat ini sedang mengalami perkembangan di bidang pariwisata pantai dan Infrastuktur kota yang semakin baik, bahkan Kabupaten Kuningan memiliki sumber daya alam yang melimpah dan salah satunya gunung ciremai yang menjadi destinasi wisata. Hal ini yang menjadi potensi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik individu maupun maupun secara keseluruhan daerahnya. Berikut adalah data realisasi penerimaan dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 1

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Ciayumajakuning Periode 2011-2017

Berdasarkan gambar 1 mengenai data PAD dan Pendapatan daerah pengamatan Realisasi penerimaan PAD Kabupaten/Kota Ciayumajakuning mengalami peningkatan. jumlah PAD setiap tahunnya namun kemandirian daerah termasuk rendah, dapat dilihat pada tabel 1 mengenai

Tabel 1

**Rata-Rata Proporsi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Ciayumajakuning Tahun 2011-2017**

No	Kab/Kota	Pajak Daerah	Pendapatan Daerah	Rata-rata Pajak Daerah
1.	Majalengka	355.254.397.406	14.456.006.245.933	2,46%
2.	Cirebon	807.431.073.261	17.182.921.861.730	4,70%
3.	Kuningan	334.948.353.317	13.677.282.855.789	2,45%
4.	Indramayu	442.071.358.789	17.548.609.532.603	2,52%
5.	Kota Cirebon	715.160.807.822	8.122.386.197.445	8,80%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota Ciayumajakuning, terlihat belum mampu untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya dan masih mengandalkan pendapatan dari pemerintah pusat,

Presentasi Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten Majalengka yaitu sebesar 2,46% dan 0,91% sedangkan pendapatan daerah

selain Pajak Daerah dan retribusi terutama bantuan pemerintah masih sangat tinggi yaitu sebesar 97,54% dan 99,09%, begitu juga dengan Kabupaten Cirebon memiliki jumlah Pajak Daerah dan Retribusi 4,70% dan 1,63% sedangkan bantuan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi yaitu sebesar 95,3% dan 98,37%, Kabupaten Kuningan memiliki jumlah Pajak Daerah dan Retribusi 2,45% dan 1,82%

sedangkan bantuan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi yaitu sebesar 97,55% dan 98,18%, Kabupaten Indramayu memiliki jumlah Pajak Daerah dan Retribusi 2,52% dan 0,83% bantuan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi yaitu sebesar 97,48% dan 99,17%, begitu juga dengan Kota Cirebon memiliki jumlah Pajak Daerah dan Retribusi 8,80% dan 1,09% sedangkan bantuan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi yaitu sebesar 91,2% dan 98,91%.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Variabel dalam penelitian ini adalah Kemandirian Pembangunan Daerah. Kemandirian Penguasaan Daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah yaitu dilihat dari seberapa besar kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah. Kemandirian pembangunan daerah dapat diukur menggunakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi Total Pendapatan Daerah pada Kabupaten/Kota Ciayumajakuning periode 2011-2017 dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} / (\text{Total Pendapatan Daerah}) \times (100\%)$$
 (Abdul Halim, 2018).

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan (Ciayumajakuning).

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, sehingga diperoleh Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 4 Kabupaten dan 1 Kota dengan periode penelitian selama 8 tahun. Sehingga total sampel dalam penelitian ini yaitu 40 sampel.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data sekunder. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Dokumentasi yang diperoleh melalui situs resminya ([www.djpk.keu.go.id](http://www.djpk.keu.go.id)) dan Badan Pusat Statistik melalui situs resminya ([www.jabar.go.id](http://www.jabar.go.id)).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah data rata-rata kemandirian kab/kota Ciayumajakuning periode 2011 – 2018.

**Tabel 2**  
**Rata-Rata Kemandirian Kab/Kota Ciayumajakuning**  
**Periode 2011 - 2018**

No	Kab/Kota Tahun	Kab. Majalengka	Kab. Cirebon	Kab. Kuningan	Kab. Indramayu	Kota Cirebon	Rata-rata Kemandirian
1	2011	6.78	10.88	6.33	8.64	14.32	9.39
2	2012	6.52	11.53	6.67	8.73	17.14	10.118
3	2013	7.95	10.83	6.93	8.24	20.4	10.87
4	2014	10.85	16.57	10.68	12.73	24.19	15.004
5	2015	11.38	34.1	9.66	12.04	22.79	17.994
6	2016	12.87	15.73	10.43	11.22	26.44	15.338
7	2017	19.13	15.53	13.45	17.61	31.93	19.53

8	2018	15.97	15.88	12.28	12.58	31.34	17.61
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kemandirian pembangunan pemerintah daerah pada kab/kota Ciayumajakuning secara umum masih rendah dimana pendapatan asli daerah hanya berkontribusi dibawah 20% terhadap total pendapatan daerah. Hal ini menunjukan bahwa 80% lebih dari total pembiayaan pembangunan daerah masih dibiayai oleh pemerintah pusat. Secara empiris dapat digambarkan bahwa tingkat kemandirian daerah kabupaten Majalengka berkisar antara 6.52 – 19.13% artinya masih terjadi fenomena Flypapper Effect pada kabupaten Majalengka dimana pembiayaan dalam pemerintahan daerah lebih banyak dibiayai oleh pemerintah pusat. Tingkat kemandirian pembangunan daerah kabupaten Cirebon menunjukkan kisaran 10,88% - 34,1%, secara rata-rata tingkat kemandirian pembangunan daerah kabupaten Cirebon berada pada tingkatan kedua tertinggi di kab/kota yang ada di CIAYUMAJAKUNING yaitu sebesar 16,38%, namun masih menunjukkan fenomena flypapper effect yang tinggi. Tingkat kemandirian daerah kabupaten Kuningan berada pada kisaran 6,33% – 13,45% dengan rata-rata kemandirian 9,5% menunjukan tingkat kemandirian pembangunan daerah terendah di kab/Kota CIAYUMAJAKUNING dan masih menunjukkan fenomena flypapper effect. Tingkat kemandirian Kabupaten Indramayu berada pada kisaran 8,24% - 12,73% dengan rata-rata 11,47 artinya tingkat kemandirian pembangunan daerah di Kabupaten Indramayu menunjukkan kemandirian pembangunan daerah yang rendah dan fenomena flypapper efek dalam pembiayaan pembangunan daerah. Tingkat kemandirian Pembangunan daerah Kota Cirebon menunjukkan kisaran 9,39% - 19,53% dengan

rata-rata 23,56% menunjukkan tingkat kemandirian pembangunan daerah tertinggi di Kab/Kota di Ciayumajakuning, namun tetap menunjukkan fenomena flypapper effect dimana pembiayaan pemerintah daerah lebih banyak dibiayai oleh pemerintah pusat artinya pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri.

### Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum di Kab/Kota Ciayumajakuning menunjukkan tingkat kemandirian pembangunan daerah yang rendah artinya pemerintah daerah kab/Kota Ciayumajakuning belum mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri dan masih tergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat

Secara teoritis sutau daerah dikatakan mandiri apabila pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tanpa mengandalkan sebagian besar bantuan dari pemerintah pusat. Abdul Halim (2018) menyatakan bahwa ciri-ciri dari kemandirian daerah bisa dilihat dari suatu daerah ketika mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu : Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan mengelola sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu daerah dikatakan mandiri apabila memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota Ciayumajakuning masih belum mandiri atau

memiliki tingkat kemandirian yang rendah, hal ini disebabkan karena pemerintah daerah kab/kota Ciayumajakuning belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga proporsi dana alokasi dari pemerintah pusat memiliki propossi yang lebih besar dibandingkan PAD.

Kurang optimalnya pemerintah daerah kab/kota CIAYUMAJAKUNING dalam menggali potensi PAD seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah hannya yang dipisahkan, menjadi penyebab utama rendahnya pendapatan Asli Daerah yang menyebabkan tingkat kemandirian pembangunan daerah kab/kota menjadi rendah.

#### 4. KESIMPULAN

##### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian pembangunan daerah Kab/Kota Ciayumajakuning masih rendah Artinya masih terdapat fenomena flypaper effect, hal ini terlihat dari masih tergantungnya pemerintah daerah pada pendanaan dari pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerahnya.

##### Saran

Kemandirian pembangunan daerah merupakan cerminan kualitas otonomi daerah yang tercermin dari kemampuan daerah dalam membiayai pembangunannya dengan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah kab/kota sebaiknya:

1. Kab/Kota Ciayumajakuning sebaiknya mengoptimalkan potensi-potensi PAD seperti penggalan potensi pajak, retribusi, perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

2. Pemerintah kab/Kota ciayu Maja kuning membuaat pemetaan potensi PAD yang sedang mengalami perkembangan dan potensial untuk berkembang sehingga mampu meningkatkan PAD yang akan menciptakan kemandirian pembangunan Kab/Kota Ciayumajakuning.
3. Pemerintah Kab/Kota Ciayumajakuning sebaiknya menggali potensi PAD yang mampu memberikan multiplier effect pada sector lain, misalnya menggali potensi Wisata dan perhotelah yang akan meningkatkan pendapatan sector restoran, parker dll, yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Kusufi, Muhammad Syam. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Aditya Ramadhan Sriparno dan Maria M. Ratna Sari. 2015. Analisis Pajak dan Retribusi Daerah Pada Tingkat Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi.Vol.13.No.2, ISSN: 2302-8556. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud). Bali.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2013-2017. <https://www.bps.go.id/publication/2018/10/05/89552064fb46e82d2b50468f/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2013-2017.html> (di akses pada tanggal 27 September 2018)
- Badan Pusat Statistik. 2017. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia
- Dadang Sudirno dan L.Suparto. 2017. Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Teori

- dan Aplikasi. Fakultas Ekonomi Universitas Majalengka. Majalengka.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. APBD, Realisasi APBD, dan Neraca. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412> (di akses pada tanggal 27 September 2018)
- Endang Mulyani. 2017. Ekonomi Pembangunan. UNY Press. Yogyakarta.
- Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono dan Victorina Tirayoh. 2016. Pengaruh Pajak Daerah dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 No. 04. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Fajar Sidik. 2014. Majalengka Siap Menjadi Pusat Pertumbuhan Baru Di Jabar Timur. <http://bandung.bisnis.com/read/20140622/82446/511333/bupati-majalengka-siap-menjadi-pusat-pertumbuhan-baru-di-jabar-timur> (di akses pada tanggal 26 November 2018).
- Fariad Ali dan Andi Syamsu Alam. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Refika Aditama. Bandung.
- Imam Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. BPFE Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ilmi Yanfaunnas. 2017. 11 Pendapatan Asli Daerah BPPD Kabupaten Cirebon Lampau Target. <http://www.radarcirebon.com/11-pendapatan-asli-daerah-bppd-kabupaten-cirebon-lampau-target.html> (di akses pada tanggal 20 Oktober 2018).
- Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawati Putri. 2016. Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Syariah Paper Accounting. ISSN 2460-0784. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lestari L F Simanjuntak, dkk. 2013. Analysis of Flypapper Effect in General Allocation Fund And Regional Original Income to Regional Expeniture of District and Cities in South Sumatera. Four Annual Confrence. Penang, Malaysia.
- Manasep Orocomna, B. Elita Bharanti dan Paulus K. Allo Layuk. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah. Vol. 2 No. 3, ISSN 2477-7838.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Andi. Yogyakarta.
- Marihot Pahala Siahaan. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muradjad Kuncoro. 2014. Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah. Edisi 3. Erlangga. Jakarta.
- Nogi S. Tangkilisan, Hassel. 2007. Manajemen Publik. PT Grasindo. Jakarta.
- Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno. 2017. Ekonomi Pembangunan. CV SAH MEDIA. Makasar.
- Renny Nur'ainy, Desfitrina dan Rooswhan Budi Utomo. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil). Vol. 5, ISSN: 1858-2559.
- Reza Marizka. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian

- Keuangan Daerah Pada Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2006-2011. Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang.
- Rizka Lutfita Novalistia. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi. Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Rudy Badrudin. 2017. Ekonomika Otonomi Daerah. UPP STIM YKPM. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. Metodologi Penelitian Kombinasi. Alfabeta. Bandung.
- Sunarto dan Y Sunyoto. 2016. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi. ISSN: 0853-5205. STIE Dharmaputra Semarang.
- Titin Ruliana. 2015. Revenue Independence of East Kalimantan Province, Indonesia. Journal of Asian Scientific Reserch. Malaysia.
- Uhar Suharsaputra. 2014. Metode Penelitian. Refika Aditama. Bandung.
- Uma Sekaran. 2014. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1083 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 Tentang Pemungutan Retribusi Tidak Diborongkan Sama Seperti Pajak Daerah.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7 Tentang Pajak Daerah Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah